



COBA REBUT
- Anggota DPRD Kalbar, Martinus Sudarno, berusaha merebut spanduk para demonstran Solmadapar karena dianggap melecehkan gubernur dan DPRD, Selasa (4/10). Solmadapar sendiri melakukan aksi mempertanyakan kejanggalan temuan BPK Kalbar terkait anggaran Pemprov Kalbar tahun 2010.

TRIBUN PONTIANAK/
GALIH NOFRIO NANDA

Anggota Dewan Rebut Spanduk

PONTIANAK, TRIBUN - Unjuk rasa yang dilakukan Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (4/10) sempat diwarnai kericuhan.

Satu di antara pemicunya isi spanduk

yang diusung Solmadapar membuat Fraksi PDI Perjuangan tidak terima dan berniat melaporkan hal itu ke kepolisian. Isi spanduk yang menuai kecaman itu salah satunya "Gubernur Zinahi DPRD Lahirkan Mafia Anggaran". Gubernur Kalbar, Cornelis sendiri merupakan

Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar.

Unjuk rasa itu berlangsung saat Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi tentang APBD Perubahan Kalbar Tahun 2011. Usai rapat, sejumlah anggota DPRD Kalbar

■ Bersambung ke Hal 15

Anggota Dewan Rebut Spanduk

Sambungan Hal. 9

dari Fraksi PDI Perjuangan berupaya merebut spanduk tersebut sehingga terjadi tarik menarik. Polisi kemudian berhasil meleraikan keduanya dan mengambil alih kendali.

Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi PDI Perjuangan, Martinus Sudarno memprotes isi spanduk tersebut. "Bayangkan, sekelompok mahasiswa menyampaikan aspirasi ke wakil rakyat dengan cara mengarak spanduk bertuliskan Gubernur Zinahi DPRD. Ke mana etika demokrasi kita,"

kata Martinus Sudarno.

Ia meminta mahasiswa menggunakan etika dalam menyampaikan unjuk rasa. Menurut dia, jika ada temuan BPK terkait penggunaan anggaran daerah, dapat melaporkannya ke aparat penegak hukum.

Solmadapar membeberkan temuan dari hasil audit BPK Perwakilan Kalbar terhadap penggunaan anggaran 2010 di Satuan Perangkat Kerja Daerah Pemerintah Provinsi Kalbar sebesar Rp 156 miliar.

Mereka menduga uang yang tidak jelas pengalokasiannya itu terindikasi masuk ke kocek pribadi mafia anggaran.

Humas Solmadapar, Vito meminta kepada BPK Perwakilan Kalbar untuk segera mempublikasikan hasil-hasil temuannya ke media massa. "Kinerja BPK ini sangat lamban. Jadi, kita minta, BPK harus segera mempublikasikan kejanggalan-kejanggalan penggunaan anggaran karena sangat merugikan keuangan daerah," kata Vito. (ant)